

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korea merupakan negara yang bersatu di bawah pemerintahan tunggal dengan bahasa yang khas dan tradisi yang sama selama hampir 1300 tahun sampai pertengahan abad 20. Letak geografis Korea membuatnya menjadi negara yang sangat strategis tapi juga bisa berbahaya karena terletak di antara negara-negara dengan kekuatan besar seperti Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Hal tersebut menjadikan Korea memiliki peran yang sulit karena harus menghadapi berbagai pengaruh dan invasi yang berdatangan dari negara sekitar. Sebagai kekuatan utama, Tiongkok memiliki pengaruh yang besar dan paling dapat diterima oleh Korea. Sementara itu, Jepang datang untuk menjajah dan berhasil menduduki Kerajaan Chosun pada tahun 1910.¹

Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua di tahun 1945 membuat Korea Selatan diduduki oleh pasukan Amerika Serikat dan Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet. Amerika membangun negara demokratis yang disebut sebagai *Republik of Korea* (ROK) atau Korea Selatan itu sendiri pada tanggal 15 Agustus 1948, sedangkan Soviet membantu membangun negara komunis yang disebut *Democratic People Republic of Korea* (DPRK) atau Korea Utara pada tanggal 9 September 1948. Dua rezim yang terbentuk di satu semenanjung tersebut mewakili adanya konflik ideologi yang sangat bertentangan.

Permusuhan dan persaingan kedua Korea tidak hanya berhenti sampai di situ. Korea Selatan dan Korea

¹ Don, O. (1997). *The Two Koreas: A Contemporary History*. London: Little, Brown and Company. Hal.3

Utara terus bersaing dan berkompetisi tidak hanya dalam kekuatan nasional dengan ideologi masing-masing, tapi juga bersaing dalam keunggulan-keunggulan sistem pemerintahan, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Persaingan tajam yang berlangsung lama dan panjang itu tentu menimbulkan pemborosan biaya maupun kekuatan nasional. Biaya pertahanan seperti belanja militer dan biaya pengembangan teknologi yang sangat besar dari masing-masing pihak justru menunda perkembangan ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Konfrontasi militer skala besar pun tetap tak berkurang.

Mengingat terpisahnya Korea Selatan dan Korea Utara karena dipaksa oleh negara lain, maka keduanya mempunyai keinginan untuk melakukan normalisasi hubungan yang mewujudkan reunifikasi atau penyatuan kembali kedua negara yang sudah sekian lama terpisah tersebut. Hal itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meredam konflik yang terus berlarut-larut antara Korea Selatan dan Korea Utara. Reunifikasi tentunya perlu adanya keterlibatan antara kedua belah pihak negara dengan masing-masing kebijakan yang dikeluarkan terkait rencana reunifikasi.

Kebijakan pertama untuk memulai langkah reunifikasi datang dari Korea Selatan. Pada tanggal 4 Juli 1972, Presiden Park Chung Hee berusaha berdialog untuk menjembatani jurang pemisah ini dengan para pejabat senior Korea Utara.² Dialog tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama Korea yang membahas tentang pentingnya usaha untuk memulihkan kembali homogenitas bangsa, terlepas dari sistem politik dan ideologi yang dianut masing-masing pihak, pembentukan reunifikasi dalam upaya damai, serta merdeka dari campur tangan asing.

² Seung, Y. Y., & Aini, N. S. (2003). *SEJARAH KOREA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Upaya pendekatan dengan Korea Utara juga dilakukan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung di tahun 90-an. Pada saat itu, Korea Utara mulai tampak kesulitan dalam ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena kekurangan bahan pangan pokok semakin terasa. Sementara itu, Korea Selatan terus maju dan berkembang menjadi salah satu negara industri besar di Asia Timur serta ikut tergabung dalam berbagai aktivitas internasional. Melihat kondisi tersebut membuat Korea Selatan terdorong untuk mencoba mengadakan kontak dengan Korea Utara agar turut serta tergabung dalam masyarakat internasional dan menjadi lebih terbuka. Korea Selatan juga berusaha untuk memberikan bantuan besar termasuk bahan-bahan pokok dan obat-obatan untuk masyarakat Korea Utara sekaligus juga untuk melunakkan pemerintah.

Kim Dae Jung sebagai presiden Korea Selatan pada saat itu menetapkan Kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine Policy*).³. Melalui kebijakan tersebut, Kim Dae Jung ingin terus mencoba “menyinari” Korea Utara dengan sinar matahari, karena Korea Utara merupakan negara dingin dan beku dengan para pemimpin maupun masyarakatnya yang memakai pakaian tebal, sehingga sinar matahari yang pada mulanya tidak berfungsi, lama-kelamaan akan menciptakan udara hangat yang akan membuat mereka melepas pakaian tebalnya. Presiden Kim menetapkan 3 prinsip dalam kebijakan ini. Pertama, pencegahan agresi bersenjata. Kedua, menolak reunifikasi melalui penyerapan. Ketiga, realisasi perdamaian dan kerjasama. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan menyatakan bahwa Korea Selatan tidak ingin menyerap Korea Utara atau untuk melemahkan pemerintahannya. Namun, tujuan reunifikasi yang sesungguhnya adalah untuk menciptakan perdamaian

³ Mochtar, M., & Seung, Y. Y. (2015). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 244

daripada perubahan rezim. Kebijakan tersebut telah mengambil pendekatan dua jalur untuk memperbaiki hubungan antar-Korea, satu jalur terkait pertukaran kerjasama ekonomi dan sosial, sementara jalur lainnya mengurangi ketegangan militer dan meningkatkan kepercayaan diri.⁴

Menyangkut kebijakan Korea Selatan dan situasi yang dihadapinya, Korea Utara menggeser strateginya ke arah Korea Selatan dengan menyerukan 'persatuan nasional secara besar' untuk kepentingan Semenanjung Korea. Sebenarnya Korea Utara khawatir akan terjadinya penyerapan yang bisa dilakukan oleh Korea Selatan yang didukung oleh Amerika. Namun, Korea Utara menyadari bahwa masalah ekonominya perlu segera diselesaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya upaya mengambil keuntungan kebijakan Korea Selatan saat ini yang berpusat pada peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi. Pada bulan April 1993, Korea Utara menyerukan pernyataan seperti halnya solidaritas harus dipromosikan untuk memastikan koeksistensi, kemakmuran bersama, dan kepentingan bersama untuk tujuan akhir reunifikasi, kompetisi dan konfrontasi nasional harus dihentikan.⁵

Prestasi paling menonjol dari kebijakan Kim Dae Jung adalah sebuah kawasan industri di kota Kaesong, Korea Utara, atau lebih dikenal dengan *Kaesong Industrial Complex* (KIC). KIC sebagian besar dibiayai oleh Korea Selatan sebagai upaya meningkatkan kerja sama. Ini adalah salah satu poin penting dalam kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta sering dipandang sebagai indikator hubungan di antara

⁴ Kook, S. K. (2001). Political Future of the Korean: A New Challenge to Unification Strategies. *International Journal of Korean Studies* , 141-157.

⁵ Young, S. J. (2001). Conflicting Visipns for Korean. *Fellow, Weatherhead Center for International Affairs*.

keduanya. Dalam kawasan industri ini, perusahaan Korea Selatan diperbolehkan memanfaatkan tenaga kerja murah yang terdidik dan handal, sementara sebagai gantinya, Korea Utara memperoleh devisa.

Mencapai reunifikasi nampaknya telah menjadi salah satu tujuan nasional terpenting bagi presiden Korea Selatan. Presiden Park Geun Hye yang terpilih pada tahun 2013 tidak terkecuali. Untuk menciptakan reunifikasi, Presiden Park mengambil tiga prinsip: 1) Normalisasi hubungan antar-Korea melalui proses membangun kepercayaan, 2) Memulai skala kecil proyek penyatuan yang pada akhirnya akan menghasilkan integrasi lengkap kedua Korea, dan 3) Mengambil langkah-langkah praktis untuk mempersiapkan penyatuan dengan memperkuat kemampuan reunifikasi.

Presiden Park Geun Hye kembali menegaskan pada tanggal 6 Januari 2014 dalam Konferensi Pers Tahun Baru. Presiden Park mengumumkan bahwa membangun pondasi pada era reunifikasi adalah salah satu dari dua urusan negara. Presiden Park menyatakan bahwa persiapan harus segera dilakukan untuk melepaskan diri dari konfrontasi antar Korea, ancaman perang, ancaman nuklir, dan membuka era reunifikasi, serta kebijakan yang akan dipromosikan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, memperkuat bantuan kemanusiaan bagi warga Korea Utara, dan memperluas pertukaran sipil. Korea Utara pun akan menyambut dengan hangat usulan-usulan dari Korea Selatan jika memang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki hubungan kedua Korea.⁶

Pencapaian reunifikasi ternyata juga diinginkan oleh pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un. Pada tanggal 1 Januari 2014, Kim Jong Un mengumumkan bahwa

⁶ Young, H. P. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*. Seoul.

kemajuan baru dalam hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara harus terus dibuat demi mewujudkan reunifikasi Korea. Selain itu, Kim Jong Un juga mengatakan bahwa upaya menciptakan atmosfir yang bagus harus dilakukan untuk meningkatkan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu dengan tidak memulai konflik atau perkelahian satu sama lain dan selalu mengambil jalan maupun kesempatan yang ada untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. Kim Jong Un juga menyampaikan pidatonya di awal tahun 2016 bahwa Korea Utara dan Korea Selatan akan secara aktif melakukan dialog dan peningkatan hubungan antar keduanya. Kedua Korea akan duduk dan mendiskusikan isu-isu bangsa, termasuk reunifikasi, dengan siapa saja yang benar-benar menginginkan rekonsiliasi, solidaritas, perdamaian dan reunifikasi.⁷

Namun, fakta yang terjadi selama periode kepemimpinan Park Geun Hye justru tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Realisasi kebijakan yang ada tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan di awal pemerintahan. Pada tahun 2015, ketegangan justru terjadi secara terus-menerus antar keduanya dan mengarah ke jurang konflik bersenjata. Lambat laun Korea Selatan mulai memperlihatkan pengerasan sikap yang mencolok terhadap Korea Utara. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan Korea Selatan yang ingin memerkuat sanksinya sendiri dengan menargetkan individu dan perusahaan tertentu yang mendukung program nuklir Korea Utara. Korea Selatan mulai mengurangi bantuan-bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Bantuan yang ada sudah tidak sebesar yang diberikan pada masa kebijakan sinar matahari. Bahkan Korea Selatan mengumumkan untuk menutup KIC pada tanggal 10 Februari 2016. Padahal KIC bisa dikatakan sebagai inti dari Kebijakan Sinar Matahari yang dikejar Korea Selatan pada akhir

⁷ Ibid.

1990an sampai awal 2000an dan juga sebagai langkah bagus dalam memperbaiki hubungan Korea demi mewujudkan reunifikasi.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, karya ilmiah ini berusaha menjawab persoalan “Mengapa terjadi perubahan implementasi kebijakan Korea Selatan mengenai reunifikasi Korea di periode kepemimpinan Park Geun Hye?”

C. Landasan Teori

1. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan memertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara lain. Maka dari itu, para pemimpin suatu negara menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama maupun konflik.⁹ Hans J. Morgenthau melihat adanya dua tingkat kepentingan nasional, yaitu kepentingan vital (primer) dan sekunder. Kepentingan vital ini dimaksudkan untuk keberadaan fisik fundamental suatu negara. Hal ini meliputi kemerdekaan, perlindungan negara, integritas teritorial, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Semua negara harus mempertahankan kepentingan ini dengan harga berapa pun, terutama terkait mempertahankan kedaulatan negara, bahkan negara tidak akan ragu untuk berperang. Kedaulatan merupakan suatu

⁸ Ibid.

⁹ Hans, M. (1952). Another "Great Debate": The National Interest of the United States. *The American Political Science Review*, 46

institusi yang berarti seperangkat aturan yang dijalankan oleh negara.¹⁰ Morgenthau yakin bahwa kepentingan vital didefinisikan untuk setiap keamanan negara sebagai negara merdeka dan independen. Dalam dunia yang terdiri dari banyak negara yang terus bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, maka kelangsungan hidup negara adalah persyaratan penting dan minimum yang harus dicapai.

"Thus all nations do what they cannot help but do: protect their physical, political and cultural identity against encroachments by other nations. As long as the world is politically organized into nations, the necessary element of the national interest, that is, the survival, is the last word in world politics."

Dengan demikian, semua negara melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan, kecuali melindungi identitas fisik, politik dan budayanya dari ancaman negara lain. Sementara konsep kepentingan memang merupakan substansi politik dan tidak terpengaruh oleh waktu maupun tempat. Selama dunia diatur secara politis ke dalam negara-negara, unsur penting dari kepentingan nasional, yaitu kelangsungan hidup adalah kata terakhir dalam politik dunia yang harus diperjuangkan.

Di sisi lain, kepentingan sekunder dimaksudkan bahwa setiap negara harus berusaha untuk bernegosiasi atau berkompromi dengan pihak lain untuk mencapai kepentingannya. Biasanya, kepentingan tersebut tidak menimbulkan bahaya

¹⁰ Robert, J., & Georg, S. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

ataupun ancaman terhadap kedaulatan negara. Kepentingan nasional menjadi tujuan sebagai hasil kompromi dengan negara lain yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada.¹¹

Jika diaplikasikan, Korea Selatan berusaha mengedepankan reunifikasi untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di antara kedua negara maupun keamanan internasional. Hal ini dikarenakan Korea Utara terus melakukan uji coba nuklirnya di kawasan Korea. Bahkan pada awal tahun 2016, Korea Utara telah melancarkan 4 uji coba nuklir. Nuklir tersebut tentu bisa menimbulkan efek serius bagi keamanan kawasan, maka Korea Selatan ingin terlebih dahulu menghentikan konfrontasi serta ancaman nuklir yang terus dilancarkan oleh Korea Utara pada Korea Selatan. Perdamaian antar keduanya harus dicapai terlebih dahulu baru kemudian melakukan penyatuan.¹² Nuklir yang terus dikembangkan mengancam keutuhan wilayah dan keselamatan masyarakat, terutama mengancam stabilitas keamanan Seoul sebagai ibukota Korea Selatan.

Namun, untuk menghentikan perkembangan nuklir Korea Utara dan melindungi wilayahnya, Korea Selatan sedikit demi sedikit menghentikan bantuan ekonominya dengan menutup kerjasama perdagangan dan investasi. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang ada tidak disalahgunakan untuk semakin mengembangkan militer Korea Utara, bukannya digunakan untuk memperbaiki ekonomi atau menyejahterakan masyarakat.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

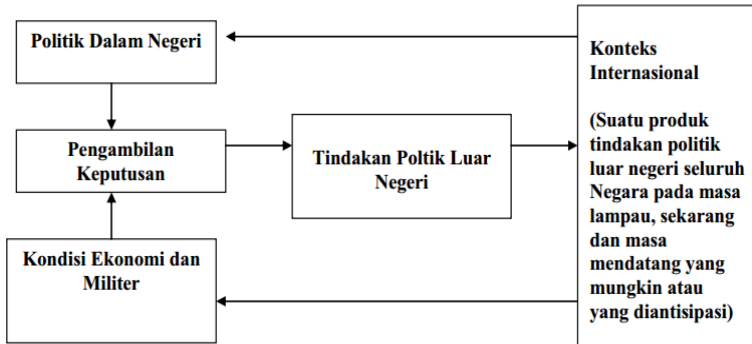
2. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan luar. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional agar bisa dicapai di luar perbatasan. Selanjutnya, strategi dasar diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Pelaku pengambil keputusan kebijakan luar negeri akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Individu-individu yang memiliki kapasitas untuk memutuskan kebijakan sebenarnya tidak dapat melakukannya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Hal ini sesuai dengan deskripsi William D. Coplin mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Menurut Coplin dalam bukunya yang berjudul *“The Introduction to International Politics: A Theoretical Overview”*, jika kita ingin menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus memertanyakan pemimpin- pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri menurut Coplin dilihat sebagai hasil dari tiga pertimbangan yang memengaruhi pembuat kebijakan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri negara, termasuk faktor budaya yang mendasari perilaku politik manusia. Kedua adalah kondisi ekonomi dan militer negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan atau keamanan. Ketiga, konteks internasional dalam artian keadaan suatu negara yang telah menjadi tujuan kebijakan luar negeri dan

pengaruh negara lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi.¹³

Bagan 1.1. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber: (Coplin, 1992)

Bagan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh kondisi domestik, khususnya politik dalam negeri. Kondisi politik dalam negeri dapat dipahami secara sederhana sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh negara yang bersangkutan. Faktor-faktor lain yang memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri adalah kemampuan ekonomi dan militer. Perdebatan panjang tentang mana yang lebih penting antara kemampuan ekonomi dan militer suatu negara membuat keduanya menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Akhirnya, Coplin menyebutkan konteks internasional sebagai faktor ketiga yang harus dipertimbangkan oleh para aktor dan pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

¹³ William, D. C. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

Jika diaplikasikan pada Korea Selatan, kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh Park Geun Hye dipengaruhi oleh sistem pemerintahannya yang demokratis dengan terus membuka pintu perundingan terkait reunifikasi Korea berdasarkan kebijakan yang sudah disepakati oleh pemimpin dan elit politik yang ada. Bahkan pada tanggal 1 Maret 1969 sampai saat ini, Korea Selatan memiliki Kementerian Unifikasi sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas semua masalah terkait hubungan dan penyatuan kedua Korea. Korea Selatan juga mengadakan polling untuk melihat ketertarikan masyarakat terhadap reunifikasi dan untuk melihat opini masyarakat apakah Korea Selatan harus melanjutkan dialog dengan Korea Utara. Berdasarkan polling pada tahun 2015, sebesar 80% masyarakat setuju dengan adanya reunifikasi.¹⁴

Kemudian terkait perekonomian, Korea Selatan sebagai negara maju telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama empat dekade terakhir untuk menjadi ekonomi industri berteknologi tinggi. Bahkan PDB Korea Selatan berjumlah dua kali lipat dari PDB Korea Utara. Sementara pertumbuhan ekonomi Korea Utara belum stabil dan masih terdapat bencana kelaparan di beberapa daerah serta masih tinggi tingkat kemiskinannya. Korea Selatan yang menghentikan aktivitas ekonomi bilateralnya dengan menutup KIC semakin membawa masalah perekonomian, meskipun pembukaan KIC juga bisa mengatasi pengangguran di Korea Selatan.

¹⁴ John, F. (n.d.). *The World Post*. Retrieved 11 20, 2017, from huffingtonpost: https://www.huffingtonpost.com/john-feffer/korean-reunification-the_b_7597430.htm

Dalam bidang militer, Korea Selatan memang memiliki anggaran belanja militer yang lebih besar dari Korea Utara. Namun, jumlah angkatan bersenjata dan artileri yang dimiliki jauh lebih kecil dengan jumlah sekitar separuh dari jumlah Korea Utara. Bahkan Korea Utara berhasil mengembangkan nuklir yang membuat resah Korea Selatan. Meskipun militer Korea Selatan mendapatkan keuntungan dari beberapa senjata dan peralatan yang dipasok oleh Amerika, termasuk lebih dari 2.000 tank dan ratusan jet. Bahkan tentara Korea Selatan juga berada di bawah payung keamanan AS dan ada 28.500 tentara Amerika yang tinggal secara permanen di Korea Selatan..¹⁵

Sementara dalam konteks internasional atau faktor eksternal, Korea Selatan melihat nuklir Korea Utara tidak hanya mengancam keamanan Semenanjung Korea tapi juga mengancam internasional. Dalam dekade terakhir, Korea Utara telah berkembang dari pengembangan bom atom mentah hingga memiliki persenjataan lengkap yang terdiri dari 20 nuklir yang dapat dimuat pada rudal jarak pendek dan menengah. Apalagi Tiongkok dan Rusia menjadi sumber dana utama melalui perdagangan yang dialihkan untuk program persenjataan Korea Utara.¹⁶ Namun, proses reunifikasi Korea tidak hanya tergantung pada Korea itu sendiri, melainkan juga bergantung pada kekuatan besar seperti Amerika yang memiliki hubungan erat dengan Korea Selatan, Tiongkok yang memiliki

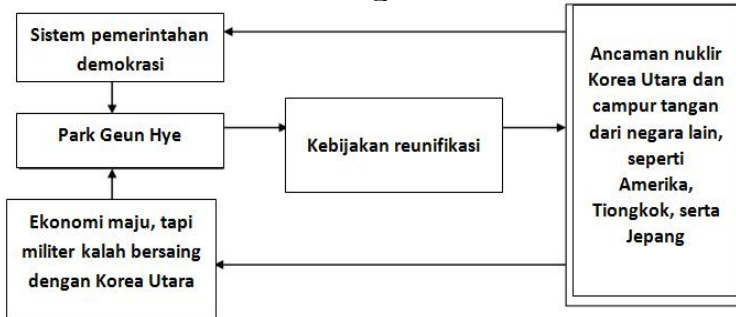
¹⁵ Hardoko Evan. (2015, 05 14). *Inilah Perbandingan Militer Korea Utara dan Korea Selatan*. Retrieved 11 20, 2017, from Kompas.com:

<http://internasional.kompas.com/read/2015/05/14/17374751/Inilah.Perbandingan.Militer.Korea.Utara.dan.Korea.Selatan>

¹⁶ BBC Indonesia. (2017, 9 6). Retrieved 11 20, 2017, from BBC: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41158713>

hubungan erat dengan Korea Utara, dan Jepang yang merupakan tetangga terdekat Semenanjung Korea.

Bagan 1.2. Aplikasi Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri



D. Hipotesis

Perubahan implementasi kebijakan Korea Selatan mengenai reunifikasi Korea di periode kepemimpinan Park Geun Hye bertujuan untuk menghentikan konfrontasi Korea Utara dan menciptakan perdamaian di kawasan Semenanjung Korea. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Politik dalam negeri Korea Selatan dengan sistem pemerintahan lebih demokratis dibandingkan Korea Utara
- 2) Kondisi ekonomi Korea Selatan yang maju sehingga dapat memberikan bantuan, tapi bantuan itu justru dialihkan untuk mengembangkan nuklir.
- 3) Kekuatan militernya kalah bersaing dengan Korea Utara yang mengembangkan nuklir.
- 4) Konteks internasional di mana nuklir Korea Utara mengancam keamanan internasional dan adanya campur tangan dari negara-negara besar.

E. Jangkauan Penelitian

Adapun jangkauan waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2013 sampai tahun 2016 ketika Park Geun Hye menjabat sebagai presiden Korea Selatan. Park Geun Hye terpilih sebagai Presiden ke-11 Korea Selatan pada tanggal 25 Februari 2013. Hal ini menjadi tanda awal kepemimpinan Park Geun Hye sebagai presiden yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan terutama terkait reunifikasi. Sementara pada tanggal 9 Desember 2016, jabatan Park Geun Hye sebagai Presiden Korea Selatan telah berakhir akibat skandal korupsi yang menimpanya, sehingga berakhir pula wewenangnya dalam membuat suatu kebijakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode *deskriptif analitik* yang berusaha memusatkan perhatian kepada masalah kemudian mengumpulkan data maupun fakta-fakta dari beberapa dokumen tentang perspektif dan kebijakan-kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam menyikapi reunifikasi. Lalu berdasarkan teori yang telah ada berusaha menganalisis secara tepat dan sistematis dengan mendeskripsikan fakta satu agar berkaitan dengan fakta yang lainnya.

Adapun level analisis dalam penelitian ini merupakan induksi, di mana unit analisis adalah negara karena negara Korea Selatan menjadi individu yang berperan dalam pembuatan kebijakan. Sementara kelompok negara atau regional merupakan unit eksplanasi karena kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Korea Selatan dijelaskan berdasarkan konteks perwujudan

reunifikasi yang melibatkan dua negara di kawasan Semenanjung Korea.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab, yaitu bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah meliputi sejarah Korea dan perkembangan reunifikasi, rumusan masalah, landasan teori yang menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori kebijakan luar negeri, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang definisi reunifikasi, arti penting reunifikasi Korea, dan sudut pandang mengenai reunifikasi Korea bagi Korea Selatan maupun Korea Utara, serta tujuan yang ingin dicapai dalam perwujudan reunifikasi tersebut.

Bab III membahas tentang perubahan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan pada periode pemerintahan Park Geun Hye yang berkaitan dengan perwujudan reunifikasi Korea, sekaligus membahas tentang respon Korea Utara berkaitan dengan kebijakan Park Geun Hye.

Sementara bab IV membahas tentang faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi perubahan kebijakan Park Geun Hye mengenai reunifikasi.

Kemudian yang terakhir yaitu bab V berisi pembahasan akhir atau kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya terkait kebijakan-kebijakan mengenai reunifikasi pada masa pemerintahan Preseiden Korea Selatan Park Geun Hye.

¹⁷ Mochtar, M. (1994). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.